

**“ANALISIS EFEKTIFITAS BANTUAN PRESIDEN (BANPRES) PRODUKTIF USAHA  
MIKRO (BPUM) TERHADAP KINERJA USAHA UMKM TERDAMPAK COVID-19”**

**(Studi Kasus Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

**Andria Luckyyanti Wibisono**

**1705026110**

**Ekonomi Islam**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdri. Andria Luckyyanti Wibisono

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo di  
Semarang

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Andria Luckyyanti Wibisono

Nim : 1705026110

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Islam

**Judul : “Analisis Efektifitas Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Kinerja Usaha UMKM Terdampak Covid-19” (Studi Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)**

Demikian ini kami setuju dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II,



**Heny Yuningrum, SE., M.Si**  
NIP: 19810609 200710 2005



**Singgih Muheramtahadi, S.Sos.I, MEI**  
NIP: 19821031 201503 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

---

**PENGESAHAN**

Nama : Andria Luckyyanti Wibisono

NIM : 1705026110

Judul : ANALISIS EFEKTIVITAS BANTUAN PRESIDEN (BANPRES) PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) TERHADAP KINERJA USAHA UMKM TERDAMPAK COVID-19 (Studi Kasus Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan telah lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 26 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, Oktober 2021

Ketua Sidang

**H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag.**

**NIP. 19670119 199803 1 002**

Penguji Utama I

**Mardhiyaturrositaningsih, S.E.Sy., M.E.**

**NIP.199303112019032020**

Pembimbing I

**Heny Yuningrum, S.E., M.Si.**

**NIP. 19810609 200710 2005**

Sekretaris Sidang

**Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I., M.E.i**

**NIP. 19821031 201503 1 003**

Penguji Utama II

**Rahman El-junusi S.E., M.M.**

**NIP. 19691118 200003 1 001**

Pembimbing II

**Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I., M.E.i**

**NIP. 19821031 201503 1 003**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW rahmat bagi semesta alam, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kejahiliyahan.

Skripsi dengan judul “**Analisis Efektifitas Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Kinerja Usaha UMKM Terdampak Covid-19**”, penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada seluruh pihak yang telah berjasa, membimbing, membantu dan memberi semangat serta doa kepada penulis, sehingga rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga penulis, Andrik Setyobudi sebagai suami yang tidak henti memberikan semangat, motivasi serta dukungan finansial serta anakku tersayang Andhra Fakhi D. Rawindra yang menjadi penyemangat terbesar.
2. Orang tua penulis, Bapak Sono dan Ibu Siti Musyarofah yang tanpa henti mengalirkan doa bagi penulis.
3. Saudaraku, Aditya Wibisono yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi dan Andika Wibisono yang tidak pernah memberikan semangat.
4. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2017, khususnya kelas C yang telah banyak menemani. Semoga kita dapat terus terjaga kekompakannya sampai tua.
5. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing penulis agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.

6. Semua keluarga, teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang dengan ikhlas telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## **DEKLARASI**

“Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan”

Semarang, September 2021

Penulis,

**Andriya Luckyyanti Wibisono**

NIM:1705026110

## TRANSLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf Arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Sehingga perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

ا = a

ي = i

و = u

### C. Diftong

أَيّ = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah ( ّ )

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *al-thibb*.

### E. Kata Sandang ( ال ... )

Kata sandang ( ال ... ) ditulis dengan *al-....* misalnya = الصناعة *al-shina 'ah*.

*Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta' Marbutah ( ة )

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الميثة الطبيعة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Terhitung sejak pandemic Covid-19 sebanyak 30 juta dari total 60 juta pengusaha Indonesia menutup usahanya. Padahal kita ketahui bersama bahwa UMKM di Indonesia menyumbang 60,3% terhadap PDB negara. Menyikapi hal tersebut pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk membantu UMKM tetap survive, salah satunya adalah dengan mendistribusikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Fokus permasalahan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas program BPUM tersebut untuk meningkatkan kinerja UMKM. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, serta kuisioner. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Sumber data yang diperoleh meliputi data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan indikator kinerja usaha seperti, pendapatan usaha, keuntungan usaha, asset usaha dan stabilitas usaha, maka dapat disimpulkan bahwa dana BPUM dapat meningkatkan kinerja usaha UMKM selama pandemic ini. Sebanyak 85% responden mengaku pendapatannya meningkat setelah menerima dana bantuan, Kemudian untuk asset usaha sebanyak 80% responden mampu membeli barang atau stock Kembali. Selain itu sejumlah 85% responden mengalami kenaikan keuntungan usaha serta stabilitas usahanya meningkat. Meski demikian tetap terdapat catatan bagi pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap penerima bantuan supaya menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya.

Kata kunci: *BPUM, UMKM, Kinerja Usaha, Pandemi Covid-19*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bismillahirrahmanirrahim, Rasa syukur dan pujian penulis panjatkan atas beragam nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada penulis. Penulis selalu berdoa memohon kepada-Nya untuk senantiasa istiqamah, tegar dan berpegang teguh diatas jalan-Nya yang lurus hingga maut datang menjemput. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada suri tauladan kita semua Nabi Muhammad shallahu alahi wasallam beserta ahlu baitnya, para sahabat setianya, dan para pengikut jejak sunnahnya hingga kelak datang hari akhir datang.

Alhamdulillahirabbil'alamin hasil karya skripsi dengan judul “Analisis Efektifitas Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Kinerja Usaha Umkm Terdampak Covid-19” telah berhasil penulis selesaikan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Penulis menyadari bahwa skripsi adalah hanya satu dari rangkaian panjang yang penulis tempuh dan jalani sejak tahun 2017 penulis berkuliah di tempat yang mulia ini. Beragam rintangan dalam menuntut ilmu, rasa capek dan lelah, semangat yang terkadang berkobar dan terkadang drop dapat penulis jalani berkat do'a, bimbingan, tuntunan, dorongan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga berbagai kendala tersebut dapat dihadapi dan diatasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis bersyukur dengan mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku wali dosen saya yang sudah membimbing perkuliahan saya sedari semester satu.

5. Ibu Heny Yuningrum, SE. M.Si sebagai dosen pembimbing 1 serta Bapak Singgih Moheramtohad, S.Sos.I, MEI sebagai dosen pembimbing 2 yang sudah sengan sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan serta civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
7. Kepada kedua orang tuaku yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan mendukung pendidikanku sampai perguruan tinggi.
8. Seluruh keluargaku yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi support dan bantuannya.
10. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa membantu penulis dengan berbagai macam supportnya.

Semarang, 30 September 2021

Penulis,

**Andria Luckyyanti W.**  
**NIM. 1705026110**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
Judul : “Analisis Efektifitas Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Kinerja Usaha UMKM Terdampak Covid-19” .....	2
PENGESAHAN.....	3
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	ii
DEKLARASI.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	1
TINJAUAN PUSTAKA.....	1
2.1 Landasan Teori.....	1
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
BAB III.....	20

GAMBARAN UMUM PROGRAM BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) DI DESA TENDAS KECAMATAN TAYU.....	20
3.1    Gambaran Umum Wilayah Desa Tendas.....	20
3.2    Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Desa Tendas.....	22
3.3    Profil UMKM Penerima Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Desa Tendas.....	28
BAB IV.....	33
PEMBAHASAN.....	33
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah jenis usaha yang berperan penting untuk membantu peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Sebab itu pemerintah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan UMKM melalui berbagai program-program yang mendukung tumbuh kembang UMKM karena dianggap sebagai langkah strategis bagi Indonesia untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Mental mandiri bagi setiap wirausaha juga terus dibentuk oleh pemerintah sebagaimana R Bawsir (1997) mengatakan bahwa wirausaha mandiri sangat diperlukan bagi setiap individu karena menurutnya bahwa usaha berpeka pada hati dan naluri bisnis yang tajam guna menembus pangsa pasar yang lebih kompetitif.

Peranan UMKM sangat krusial terhadap perekonomian Indonesia, tercatat bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia tahun 2020 sebesar 60,3%. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% dan menciptakan 99% lapangan kerja di Indonesia.<sup>1</sup> Menurut data Kementerian UKM dan BPS, omzet usaha mikro mencapai Rp 300 juta per tahun, sedangkan usaha kecil tercatat omzet mencapai di atas Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun.<sup>2</sup> Berikut penulis sajikan data tabel kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia.

*Tabel 1. 1 Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Indonesia*

No	Kontribusi	Jumlah	Satuan
1	Jumlah UMKM	65.471.134	Unit Usaha
2	Serapan Tenaga Kerja	123.368.672	Orang
3	PDB Harga Berlaku	15.832.535,4	(Rp. Milyar)

<sup>1</sup> CNN Indonesia, "Menyelamatkan UMKM Menyelamatkan Ekonomi Indonesia", [Menyelamatkan UMKM, Menyelamatkan Ekonomi Indonesia \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com), diakses 7 April 2021.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "UMKM Jadi Sektor Pertama Terdampak Corona" [UMKM Jadi Sektor Pertama Terdampak Corona \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com), diakses 7 April 2021.

4	PDB Konstan 2000	12.309.904,8	(Rp. Milyar)
5	Total Ekspor Non Migas	2.167.079,7	(Rp. Milyar)
6	Investasi Harga Berlaku	4.363.262,0	(Rp. Milyar)
7	Investasi Konstan	3.166.958,0	(Rp. Milyar)

Sumber: data diolah dari <https://kemenkopukm.go.id/>

UMKM dinilai sebagai sektor yang tahan banting terhadap krisis, terbukti pada krisis 1998 dan 2008 UMKM Indonesia mampu *survive* dan menopang perekonomian negara. Berbeda dengan dua krisis tersebut dimana UMKM masih dapat beroperasi secara normal, krisis ekonomi 2020 akibat covid-19 membuat lumpuh UMKM. Serangan wabah Covid 19 yang terjadi di awal 2020 dan menyerang secara global di seluruh dunia termasuk Indonesia, menciptakan sentiment negative di berbagai lini bisnis terutama UMKM. Dampak negatifnya adalah membatasi pergerakan dan menghambat pertumbuhan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pameran atau promosi dan terhalang oleh berbagai kebijakan seperti *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi bahwa sejumlah 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM merasakan dampak buruk dari wabah covid 19.<sup>3</sup>

Berdasarkan laporan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa sejumlah 30 juta dari total 60 juta pengusaha Indonesia menutup usahanya selama pandemic covid-19. Survey Asian Development Bank (ADB) juga mengatakan bahwa hampir 50% UMKM di Indonesia menutup sementara usahanya. Selain itu, sejumlah 30% UMKM mengalami gangguan permintaan domestic, 20% mengalami gangguan produksi, dan sejumlah 14,1% mengalami pembatalan kontrak dagang.<sup>4</sup>

*Tabel 1. 2 Perbandingan keadaan UMKM Sebelum*

<sup>3</sup> Andi Amri, *Dampak Covid 19 Terhadap UMKM di Indonesia*, Universitas Hasanudin, Vol 2, 2020, hlm.125

<sup>4</sup> Selfie Miftahul Jannah, Kadin Sebut Ada 30 Juta UMKM Tutup Akibat Pandemi, [Kadin Sebut Ada 30 Juta UMKM Tutup Akibat Pandemi COVID-19 - Tirto.ID](#), diakses pada 7 April 2020.

*dan Sesudah Terdampak Covid 19*

No	Presentase		Kategori
	Sebelum Pandemi	Setelah Pandemi	
1.	92,7%	14,1%	Usaha baik/ sangat baik
2.	1,0%	56,8%	Usaha buruk/sangat buruk
3.	6,3%	29,1%	Biasa saja

Sumber: Kata data *Insight Center*

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa covid 19 memberikan berbagai dampak terhadap UMKM, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI terdapat beberapa dampak, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Penurunan permintaan dan penjualan
- b. Kesulitan aktifitas sampai dengan penutupan usaha (sementara/tetap)
- c. Kegiatan distribusi terhambat
- d. Kesulitan bahan baku
- e. Kesulitan mendapatkan modal usaha

Sebagai langkah dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic, pemerintah mengeluarkan dana bantuan ke berbagai sektor masyarakat termasuk untuk pelaku UMKM. Melalui peraturan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, pemerintah memberikan dana hibah sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk tahun 2021 dana hibah menurun menjadi Rp 1,2 juta per pelaku usaha mikro. Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan dana BPUM sebesar Rp 6,2 triliun per 31 Maret 2021 dan telah tersalurkan kepada 5,2 juta pelaku usaha mikro dari total keseluruhan 9,8 juta calon penerima bantuan. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 penerima BPUM sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Amri, *Dampak Covid 19 Terhadap UMKM di Indonesia*, Universitas Hasanudin, Vol 2, 2020, hlm.157

<sup>6</sup> Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "Penyaluran Banpres Produktif", [Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - www.depkop.go.id \(kemenkopukm.go.id\)](http://www.depkop.go.id) diakses pada 7 April 2021.

Kebijakan memberikan bantuan modal kepada UMKM tentu diambil oleh pemerintah atas dasar berbagai pertimbangan serta berkaca dari seberapa besar keberhasilan program terdahulu yang serupa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ritawati dan Nurul (2015) bahwa Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dalam memberikan bantuan modal ke UMKM di kota Palembang sudah berjalan dan terlaksana secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan penjualan produk yang meningkat, omset penjualan meningkat serta penambahan jumlah pegawai.<sup>7</sup> Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mei Rani (2018) bahwa bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah mampu mempengaruhi pendapatan UMKM.<sup>8</sup>

Meski demikian program ini harus terus mendapatkan pengawasan ketat dari semua pihak, baik dari pihak *stakeholder* atau dari masyarakat yang berkaitan, karena pada faktanya dalam pelaksanaannya mengandung risiko yang besar. Pemerintah harus mampu memastikan apakah program ini sudah berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak jumlah UMKM di Indonesia, hanya 20% yang sudah mengakses layanan perbankan dan layanan lembaga pembiayaan formal. Artinya bahwa hanya 20% data UMKM yang valid, karena penyaluran bantuan ini melalui lembaga pembiayaan formal.

Keluhan masyarakat terus muncul terkait distribusi BPUM berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 763 laporan keluhan terkait penyaluran BPUM yang terdiri dari 642 laporan di tahun 2020 dan 121 laporan hingga Juli 2021.<sup>9</sup> seperti halnya di beberapa wilayah di Jawa Tengah sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua

---

<sup>7</sup> RA Ritawati dan Nurul Mubarak, *Efektifitas Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Terhadap UMKM di Kota Palembang*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: Economics Journal, 2015, hlm.134

<sup>8</sup> Mei Rani Amalia, *Analisis Pengetahuan Pelatihan, Bantuan Modal, dan Cara Pengelolaan Usaha terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, 2018, hlm. 107

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/23/16261561/kpk-terima-763-keluhan-terkait-penyaluran-bpum-majoritas-soal-akurasi-data?page=all>, diakses pada hari Jumat, 30 Juli 2021.

Komisi VI DPR RI Martin Martin Maurung yang memimpin kunjungan kerja spesifik di Semarang, banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut tetapi tidak terdaftar karena masalah akurasi data. Sedangkan banyak UMKM yang sebenarnya sudah lama tidak melakukan aktifitas dagang namun bisa mendapat bantuan BPUM karena masih memiliki izin usaha.

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori Kawasan andalan menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003, juga mengalami permasalahan mengenai distribusi BPUM. Berdasarkan laporan dari Ketua Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Pati, per Agustus jumlah UMKM yang didaftarkan untuk mendapat BPUM sebanyak 3.000 pelaku usaha. Harapannya tentu dengan menerima bantuan tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Pati. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arin (2020) bahwa omzet dan jenis usaha mengalami penurunan kinerja saat perekonomian Indonesia terdampak covid-19.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Siti (2021) juga mengatakan bahwa pandemic memberikan dampak besar terhadap UMKM di Indonesia, maka dari itu diharapkan adanya sinergi antara kebijakan makro pemerintah dengan kebijakan mikro pada perusahaan atau pelaku usaha untuk membatu UMKM Indonesia tetap bertahan dan mampu melewati tantangan krisis ekonomi.<sup>11</sup>

Dari uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai BPUM selama pandemic Covid-19 dengan memilih Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sebagai objek penelitian. Desa Tendas merupakan desa yang mayoritas mata pencaharian ke dua penduduknya adalah bekerja sebagai pedagang yaitu sejumlah 931 jiwa dari total 2931 penduduk. Maka dari itu banyak masyarakat yang mengajukan bantuan BPUM melalui lembaga yang sudah diatur oleh pemerintah.

---

<sup>10</sup> Arin Ramadhiani Soleha, *Konsisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, hlm. 165

<sup>11</sup> Siti Nuzul Laila Nalini, *Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol.4 No 1, 2021, hlm.662

Berdasarkan hasil temuan lapangan penulis, bahwa terdapat sekitar 40 warga yang sudah mendapatkan bantuan BPUM dari pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut dan penelitian terdahulu yang belum ada secara spesifik meneliti mengenai efektifitas program BPUM, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Kinerja UMKM Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati).

### **1.2.Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang disampaikan diatas, peneliti mengambil dua rumusan masalah untuk memfokuskan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektifitas Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap kinerja Usaha UMKM terdampak covid 19 di Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?
2. Bagaimana efektifitas Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap kinerja Usaha UMKM terdampak covid 19 di Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam prespektif Ekonom Islam?

### **1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis efektifitas Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap kinerja Usaha UMKM terdampak covid 19 di Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
3. Menganalisis efektifitas Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap kinerja Usaha UMKM terdampak covid 19 di Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam prespektif Ekonomi Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan di harapkan

dapat menjadi tambahan literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah Daerah terkait pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran *stakeholder* dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan BPUM.

## 3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang kebijakan mengenai Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan aturan pemerintah dalam membantu mengurangi beban para pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhannya.

### 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tahapan dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, dan pada akhirnya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala dan isu tertentu.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok”.<sup>13</sup> Penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi bagi penyusun. Menurut Sukmadinata (2007) penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti

---

<sup>12</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010, hlm. 1.

<sup>13</sup> Lexy. J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 6.

membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data primer

Sumber data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.”<sup>15</sup> Dalam penelitian ini data primer bersumber pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tayu, serta wawancara dengan penerima BPUM sebagai informan yang mewakili populasi. Dalam menentukan informan sebagai sample, penulis menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan penarikan *sampling purposive* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>16</sup>.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah “data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.”<sup>17</sup> Data sekunder ini diperoleh dari dokumen atau laporan yang sudah tersedian. Selain itu juga didapatkan dari berbagai referensi seperti dokumen di Dinas Koperasi, buku, jurnal, artikel dan penelitian lain yang terkait dari penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu

---

<sup>14</sup> Raco, *Metode ...*, hlm. 2.

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91.

<sup>16</sup> Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005, hlm.58.

<sup>17</sup> *Ibid...*, hlm. 94

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu dapat ditarik kesimpulannya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini jika ingin meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah penerima BPUM di Desa Tendas yang berjumlah 40 peserta.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Apabila populasi tersebut besar dan tidak memungkinkan peneliti untuk mempelajari semua karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka dapat menggunakan sampel dalam dari populasi yang ditentukan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan menggunakan penarikan sampling purposive. sampling purposive adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel untuk populasi menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha mikro yang menerima bantuan BPUM di Desa Tendas Kecamatan Tayu.
- 2) Pelaku usaha mikro yang menerima BPUM baik pada tahun 2020 atau tahun 2021.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu berjumlah 20 responden dari.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai “suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu

---

<sup>18</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.7.8

kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan dan diagnose.”<sup>19</sup>

Dari segi pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi *participation observation* (observasi berperan serta), yakni peneliti dalam melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data. *Non participant observation* yakni peneliti hanya sebagai pengamat independent.<sup>20</sup> Sebagai Langkah awal peneliti melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UKM menggunakan metode observasi non participant dimana peneliti hanya sebagai pengamat kemudian merangkumnya dalam catatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah “proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.”<sup>21</sup> Terdapat beberapa jenis wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, dimana pertanyaan yang diajukan ditetapkan sendiri oleh pewawancara yang telah disiapkan sebelum melaksanakan wawancara dengan narasumber.

c. Kuisisioner

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyar, *Wawancara, Observasi dan Focus Group*, Jakarta: Raja Walipress, 2013, hlm. 131.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 145.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2001, hlm. 124.

Kuisisioner merupakan “Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau tertulis kepada responden untuk dijawabnya.” Dalam penelitian ini kuisisioner yang digunakan menggunakan skala pengukuran Guttman. Dimana pada skala ini apabila penulis ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu masalah yang ditanyakan seperti “ya” dan “tidak”. Jika pencapaian hasil kuisisioner mencapai di bawah 50% maka objek yang diteliti kurang efektif. Jika pencapaian kuisisioner mencapai di atas 50% sampai 100% maka dapat dikatakan objek yang diteliti mendekati efektif. Penilaian positif diberi skor 1 dan penilaian negative diberi skor 0.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh penulis dan sudah terkumpul selanjutnya akan diolah dengan menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring adalah memilih dengan hati-hati apakah data yang diperoleh relevan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Mengatur dan mengklasifikasikan merupakan mengelompokan data sesuai dengan aturan tertentu.<sup>22</sup> Secara umum pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) adalah mengoreksi dan memastikan apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan masalah yang menjadi fokus peneliti.
- b. Penandaan data (coding) adalah memberikan catatan, memberikan tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan masalah.
- c. Rekomendasi data (reconstructing) adalah Menyusun data secara beratur dan berulang, sehingga mudah dipahami.

---

<sup>22</sup> Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 89.

d. Sistematisasi data (systematizing) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan “menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data).”<sup>23</sup>Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menerapkan informasi faktual dari berbagai sumber informan.

### 1.5.Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang dalam setiap babnya terdapat beberapa sub bab pembahasan, yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Sistematika Penelitian.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori teori yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu pembahasan umum tentang UMKM, pembahasan umum tentang Efektifitas, Pembahasan umum tentang Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan mekanisme pelaksanaannya.

#### BAB III: PEMBAHASAN UMUM

---

<sup>23</sup> Djunaidy Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Att Ruz Media, 2017, hlm. 163-164.

Bab ini berisi tentang profil Desa Tendas dari pengurus, gambaran wilayah, gambaran keadaan ekonomi masyarakat. Pada bab ini juga membahas mengenai gambaran umum dari pelaksanaan BPUM di Desa Tendas.

**BAB IV: ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM BANPRES  
PRODUKTIF USAHA MIKRO DI DESA TENDAS  
TERHADAP KINERJA UMKM TERDAMPAK COVID-19**

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Secara umum UMKM diartikan sebagai individu/kelompok/badan usaha yang berkegiatan ekonomi produktif dalam tahapan kecil. BPS sendiri melihat sudut pandang UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Jika memiliki tenaga kerja kurang dari empat maka disebut level industry rumah tangga. Jika memiliki tenaga kerja kurang dari sepuluh dan diatas empat maka disebut industry kecil. Adapun jika tenaga berjkumlah 10-99 maka disebut industry menengah/sedang. Jika sudah lebih dari 100 tenaga kerja maka sudah tidak masuk kategori UMKM melainkan UB (Usaha Besar). Adapun menurut UU maka UMKM diartikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dilakukan perorangan atau badan usaha.<sup>24</sup>

Adapun kriteria UMKM sendiri menurut UU terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>25</sup>

- a. Usaha produktif dengan asset <50 jt (tanpa tanah dan bangunan) serta penjualan pertahun max. 300jt disebut usaha mikro.
- b. Usaha produktif dengan asset 50jt – 500jt (tanpa tanah dan bangunan) serta penjualan pertahun 300jt – 2.5 M disebut usaha kecil
- c. Usaha produktif dengan asset 500jt – 10 M (tanpa tanah dan bangunan) serta penjualan pertahun 2.5 M – 50 M disebut usaha menengah.

Asas UMKM dijelaskan berdasar pasal 2, UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

---

<sup>24</sup> Rachmawan Budiarto (et.al), *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Praktis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015, h. 2-3.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.3.

lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan tujuannya berdasar pasal 3, UU No.20 Tahun 2008 adalah menumbuhkan dan mengembangkan usaha guna membangun perekonomian nasional berdasar demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

UMKM dikenal sebagai salah satu sektor yang memiliki peran cukup penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Tidak lepas dari peran pentingnya, UMKM masih menghadapi berbagai masalah klasiknya. Secara umum, Winarni mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu, kurangnya modal, kendala pemasaran, persaingan ketat, sulit mendapat bahan baku, teknis produksi dan keahlian yang kurang, keterampilan manajerial kurang dan iklim usaha yang kurang kondusif.<sup>26</sup> Mengingat juga sudah banyak jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM akan tetapi masih tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM yang ada. Dilihat dari indeks rata-rata nilai penggunaan jasa keuangan pada 2015-2018 hanya 0,099 dari skala 1 masyarakat Indonesia yang telah menggunakannya.<sup>27</sup> Untuk itu perlunya pengembangan UMKM menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat, selain itu perlu juga adanya kerjasama antar kelompok UMKM.

Tidak banyak UMKM yang unggul dalam pemasaran, terutama pada produk kebutuhan sehari-hari dengan banyak pesaing. Dan untuk memiliki keunggulan pemasaran, UMKM harus mampu menciptakan citra merek sebagai penunjuk identitas, kualitas, value proposition dan posisi terhadap pesaing. Peningkatan daya saing UMKM dapat dilakukan dengan menerapkan strategi bersaing yang tepat.

### **2.2.2. Teori Efektifitas**

---

<sup>26</sup> Endang Sri Winarni, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*, Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006.

<sup>27</sup> Novatul Isrowiyah, Warno, Rahman El Junusi, *Development Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises through Islamic Financial Inclusion*, *Iqtishoduna*, Vol.9 No.1, 2020, h.67.

Efektifitas sangat diperlukan sebagai salah satu unsur pokok dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tujuan dan sasaran telah tercapai. Secara sederhana, efektifitas adalah “pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Dijelaskan oleh Steers, bahwa efektifitas adalah “jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”<sup>28</sup> Sedangkan menurut pendapat Caster I. Bernard, efektifitas adalah “tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama, sehingga efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>29</sup>

Menurut Subagyo dalam jurnal ekonomi dan sosial bahwa efektifitas adalah “kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektifitas adalah sebuah keadaan yang dikehendaki. Jika ada seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan memiliki maksud dan tujuan tertentu dan memang dikehendaki secara sadar, maka pekerjaan orang tersebut dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat dari maksud yang dikehendaki”. Efektifitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri sebagai berikut:<sup>30</sup>

*Tabel 2. 1 Standar Ukuran Efektifitas Sesuai Acuan  
Litbang Depdagri*

<b>Rasio efektifitas</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
--------------------------	------------------------

<sup>28</sup> Badrudin, *Dasar-dasar manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 21.

<sup>29</sup> Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Ppembinaan Manajemen dan Erlangga, 1980, hlm. 5.

<sup>30</sup> Ni Wayan Budiani, *Efektifitas Program Penanggulangan Penanggungan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT, hlm. 52.

Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40-59,99	Tidak Efektif
60-79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

*Sumber: Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*

Sebagaimana menurut Subagyo dalam perhitungan analisisnya menggunakan statistic sederhana yakni:

$$\text{Efektifitas Program} = R/T \times 100$$

R = Jumlah Jawaban

T = Jumlah Total Jawaban

Dari beberapa pengertian efektifitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat dipahami bahwa efektifitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Pencapaian target organisasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai memiliki kejelasan, dimaksudkan supaya karyawan dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan dapat mencapai tujuan tersebut.
2. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan jelas, Strategi merupakan jalan yang digunakan oleh para implementer supaya lebih terarah dalam mencapai atau menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

3. Analisis dan proses perumusan kebijakan yang matang , sebuah kebijakan yang telah ditentukan harus mampu menjembatani berbagai strategi yang telah ditentukan oleh implementer. Sehingga dalam prosesnya akan lebih mudah.
4. Matang dalam perencanaan, memutuskan segala sesuatu untuk masa yang akan datang dengan pertimbangan yang matang.
5. Penyusunan program yang disusun harus sesuai dengan kebijakan dan strategi yang diambil oleh implementer supaya karyawan dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah lagi dan sesuai track.
6. Adanya sarana dan prasarana yang optimal dan menunjang, karena salah satu kunci produktivitas dari karyawan adalah dengan dibantu oleh sarana dan prasana yang mendukung.
7. Efektif dan efisien dalam pelaksanaan, Sebaik apapun program kerjanya apabila dalam pelaksanaannya kurang efektif dan efisien maka akan semakin jauh dari jalan untuk menuju tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut.
8. Adanya system pengawasan yang ketat dan mendidik. Menyadari bahwa sifat manusia beragam dan perlu dikontrol, sehingga dalam menunjang efektifitas tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dari atasan yang ketat dan berkeadilan.

Budiani (2007:53) menyatakan “mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut”:

1. Tujuan program. Adalah pengukuran apakah tujuan yang di tentukan telah tercapai sesuai rencana pengorganisasin di awal.
2. Ketepatan sasaran program. Adalah sejauh mana program tersebut tepat sesuai dengan target yang telah ditentukan di awal..

3. Sosialisasi program. Adalah kemampuan suatu organisasi dalam menyampaikan informasi terkait program yang telah dirancang kepada masyarakat secara umum atau peserta program tersebut.
4. Pemantuan program. Adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan saat program tersebut sedang dilaksanakan dalam bentuk pemantauan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan adalah “keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktudan sasaran yang merupakan target kongktit”.
2. Integrasi yaitu “pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi”.
3. Adaptasi adalah “kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.”

### **2.2.3. Teori Kinerja Usaha**

Umumnya seorang wirausaha yang sukses memiliki kompetensi yang baik yang ditunjukkan dengan sikapnya pada saat menjalani usaha. Dengan memiliki sikap yang terarah serta visioner dapat membantu seseorang mencapai prestasi usaha yang diharapkan. Kinerja Usaha atau yang bisa diketahui dengan *Job Performance* memiliki beragam definisi teori.

Hasibuan dalam teorinya mengatakan kinerja adalah hasil yang dicapai dalam melakukan atau melaksanakan suatu hal berlandaskan kecakapan, kompetensi, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.<sup>31</sup> Veithzal Rivai juga berpendapat bahwa kinerja adalah hasil/keberhasilan yang dicapai baik kelompok atau individu dalam merealisasikan pekerjaan, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.<sup>32</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Murtiadi, terdapat teori kinerja yang dinyatakan oleh Harris dan Bona yaitu “ukuran keberhasilan atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang diukur tiap kurun waktu tertentu.”<sup>33</sup> Sedangkan pada pendapat Pelham dan Wilson (1996) mendefinisikan “kinerja perusahaan sebagai sukses perusahaan dalam mengeluarkan produk baru dan pengembangan pasar, dimana kinerja perusahaan dapat diukur melalui pertumbuhan penjualan dan porsi pasar.”

Dalam melihat seorang wirausaha mempunyai kinerja yang baik atau tidak tentu ditentukan dengan berbagai aspek, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli rinciannya sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Penjualan yang bertumbuh

Kinerja usaha yang baik salah satunya ditandai dengan terus bertumbuhnya penjualan. Penjualan yang bertumbuh dari satu periode ke periode menandakan permintaan pasar semakin banyak dan luas. Hal ini tentu baik bagi usaha untuk dapat bertahan dan berkembang. Penjualan yang terus bertumbuh juga menghasilkan pendapatan yang bertambah naik.

b. Modal yang bertambah

---

<sup>31</sup> Romansyah Sahabuddin, *Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam Perspektif Kewirausahaan*, Makassar: Penerbit Carabaca, 2015, h. 15

<sup>32</sup> Dahmiri dan Kharisma Sakta, “Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun”, *Jurnal Mankeu*, Vol. 3, No.1, 2014, h. 378.

<sup>33</sup> Minizu, “Pengaruh Faktor...”, h. 34

<sup>34</sup> Elisabeth Lia Riani Kore dan Dina Fitri Septarini, “Analisis Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Industri Kecil Formal Di Kabupaten Merauke)”, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol. 11, No. 1, April 2018, h. 26-27.

Kinerja usaha yang baik juga ditandai dengan meningkatnya modal pelaku bisnis dibandingkan dengan modal awal ketika mulai membuka usaha atau merintis usaha. Modal sangat berpengaruh terhadap penciptaan laba. Modal dapat diperoleh dari modal pribadi atau pinjaman.

c. Tenaga kerja yang bertambah

Kinerja usaha yang baik dan maju juga ditandai dengan bertambahnya pegawai atau tenaga kerja. Hal itu menjadi tanda bahwa permintaan pasar terhadap produk atau jasa tinggi sehingga mengharuskan meningkatkan produksi dan kapasitasnya. Tak hanya dari segi kuantitas, namun kualitas SDM juga sangat penting untuk kinerja usaha.

d. Pangsa pasar yang bertumbuh

Semakin tinggi penerimaan dan permintaan pasar maka akan semakin baik untuk pengembalian investasi dan keuntungan yang diperoleh pelaku sehingga berdampak pada kinerja usaha yang baik. Hal ini bisa dilihat dengan bertambahnya konsumen, permintaan kebutuhan barang/jasa, tingkat penjualan dll.

e. Laba yang bertumbuh dan meningkat

Laba merupakan kunci dan tujuan seseorang dalam berbisnis/usaha. Semakin baik dan bertumbuh laba seseorang maka bisnis akan bertahan dan berkembang. Hal ini berpengaruh pada kinerja usaha.

#### **2.2.4. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)**

Bantuan bagi pelaku usaha mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah “bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari anggaran penerimaan dan belanja negara.” BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemic covid 19 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. BPUM diberikan satu

kali dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.400.000 pada tahun 2020, kemudian diperbaharui pada 2021 menjadi Rp 1.400.000. Dana ini diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu, diantaranya:

- a. Terdaftar sebagai warga negara Indonesi
- b. Memiliki NIK (nomor induk kependudukan)
- c. Memiliki suatu usaha mikro yang kemudian dibuktikan dengan surat usuan penerima BPUM serta beberapa lampiran yang ditentukan.
- d. Tidak termasuk aparatur sipil negara, anggota tantara nasional Indonesia, anggota Kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan banpres harus diusulkan oleh pengusul yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM RI, seperti: dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, koperasi yang telah disakan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, perbankan, perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri dari BUMN dan BLU. Kemudian untuk tata cara penyaluran BPUM meliputi:

- a. pengusulan calon penerima
- b. pembersihan data dan validasi data calon penerima
- c. penetapan penerima
- d. pencairan dana BPUM
- e. laporan penyaluran

Dalam BPUM, akad yang diterapkan adalah hibah. Hal tersebut didasarkan pada Pernenkop-UKM No.6 tahun 2020 yang tidak mengatur terkait kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah disalurkan. Pernyataan bahwa hibah adalah akad yang diterapkan dalam BPUM diperkuat dengan informasi yang disampaikan dalam Indonesia.

go. id (Portal Informasi Indonesia) yang menyatakan “tidak ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap banpres produktif karena bantuan ini merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima tidak dipungut biaya sepeserpun dalam penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro.”

### **2.2.5. Prinsip Ekonomi Islam**

Ekonomi dalam Islam menurut para ahli Ekonomi dalam Islam adalah “ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh ialah kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat”. Ilmu ekonomi Islam adalah “pengetahuan dan aplikasi ajaranajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencairan dan pengeluaran sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap allah dan masyarakat”. ekonomi Islam sangat terkait sekali dengan rencana Islamiah ilmu pengetahuan, dimaknai sebagai segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah.

Berikut ini berbagai pengertian Ekonomi islam dari beberapa sumber buku:<sup>35</sup>

- a. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah “bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu

---

<sup>35</sup> Mei Santi, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Pengawasan Syariah*, Jurnal Eksyar Volume 4 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 55.

yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih.”

- b. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi islam sebagai “suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam”.
- c. Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi islam merupakan “sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan.
- b. Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip al-Mas’uliyah (accuntability, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (Mas’uliyah al-afrad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (Mas’uliyah almuj’tama), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (Mas’uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.
- d. Prinsip al-kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip keseimbangan/prinsip wasathiyah (al-I’tidal, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-

---

<sup>36</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum: Volume 4 Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 244-247.

batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain” Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.
- g. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, ‘an taradhin).
- h. Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Menurut M. Umar Chapra, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, prinsip ekonomi Islam, yaitu :

- a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan)

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan

hubungan dengan Allah (hubungan vertikal) dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an. Lapangan ekonomi (economic court) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (hedonism) dan kepentingan diri sendiri (individualis), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, yang menjadi landasan ekonomi Islam adalah tauhid ilahiyyah.

b. Prinsip Perwakilan (Khilafah)

Manusia adalah Khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.

c. Prinsip Keadilan ('Adalah)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakkan keadilan dan pembasmi bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Al-Qur'an, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakkan keadilan. Bahkan Al-Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Maidah (5):8: ,hai orang-orang yang beriman hendaklah

kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

d. Prinsip Tazkiyah

Tazkiyah berarti penyucian (purification). Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agen of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana dengan baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.

e. Prinsip Al- Falah

Al-Falah adalah konsep tentang sukses dalam Islam. Dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama didunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan diakhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, dalam kacamata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia ( baik ekonomi maupun sektor lainnya), dengan persiapan untuk kehidupan diakhirat nanti.

Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa prinsip ekonomi Islam, yaitu : Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, kehidupan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib menjalankan petunjuknya. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukan kepadanya untuk memenuhi amanah Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja yang sesungguhnya adalah menghasilkan (produksi). Islam menentukan

berbagai bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah.

Hak milik manusia dibebani kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Harta tidak beredar dikalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakkan. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memproleh kecukupan dan kebutuhan hidup.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dari tahap ini penulis mencoba menelusuri terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis kali ini. Dengan harapan tidak ada kesamaan penelitian ataupun pengulangan pembahasan terhadap penelitian penulis. Adapun penelitian terkait adalah sebagai berikut:

1. Siti Nuzul Laila Nalini (2021) dengan judul *Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak pandemic Covid-19 terhadap eksistensi UMKM dalam situasi pandemic. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemic memberikan dampak besar terhadap laju pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sinergi kebijakan makro dari pemerintah dengan kebijakan mikro perusahaan harus bisa berjalan dengan baik untuk membantu UMKM tetap survive. Pada akhirnya UMKM selaku entitas bisnis harus bisa mengelola manajemen *business cycle* pada 4 siklus yaitu, puncak siklus, resesi, palung dan pemulihan.

2. Arin Ramadhiani Soleha (2020) dengan judul *Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi UMKM di masa pandemic di tengah-tengah program pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi dan penurunan yang sangat signifikan. Hal ini jelas berkaitan dengan menurunnya omzet dan jenis usaha saat sektor perekonomian Indonesia terdampak pandemic Covid-19. Maka dari itu berbagai langkah dan kebijakan seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi pengangan pemerintah untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat secara normal.
3. Heri Kurniawansyah HS 2020 *Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 pada Masyarakat Rentan di Indonesia*. Covid-19 memiliki dampak besar pada berbagai masalah khususnya masalah ekonomi, terutama masyarakat yang tergolong rentan atau masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengetahui konsep kebijakan pemerintah pusat atau daerah dalam menangani eksternalitas ekonomi akibat pandemic Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksternalitas ekonomi dari covid-19 paling nyata terlihat banyaknya karyawan dirumahkan, PHK, berbagai perusahaan yang bangkrut, yang pada akhirnya akan berdampak pada angka kemiskinan masyarakat Indonesia karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>37</sup>
4. Rahmanda Muhammad Thaariq 2020 *Kemiskinan Multidimensi dan Risiko Covid-19 di Indonesia*. Studi ini berbasis pada penghitungan deprivasi dari indeks kemiskinan multidimensi Indonesia untuk

---

<sup>37</sup> Heri Kurniawansyah, *Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 pada Masyarakat Rentan di Indonesia*, Indonesian Journal of Social Science and Humanities, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 130.

menentukan tingkat risiko yang dihadapi oleh penduduk Indonesia. Dari 176 juta jiwa penduduk yang tergolong dalam kelompok berisiko, terdapat sekitar 21,43 juta jiwa merupakan penduduk miskin multidimensi. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara jumlah orang miskin multidimensi dan jumlah orang yang berisiko di suatu provinsi di Indonesia. Penelitian ini membuat simulasi bahwa jika tidak ada kebijakan pembatasan sosial yang efektif maka kelompok miskin multidimensi berisiko positif covid-19 bisa mencapai 1,13 juta orang. Namun, jika kebijakan ini diterapkan maka jumlah orang yang terinfeksi dalam kelompok ini bisa dikurangi hingga mencapai 27.348 jiwa.<sup>38</sup>

5. Mei Rani Amalia (2018) dengan judul *Analisis Pengaruh Pelatihan, Bantuan Modal, dan Cara Pengelolaan Usaha terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, bantuan modal dan cara pengelolaan usaha secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM sentra batik Desa Bengle Kec. Talang Kab. Tegal.
6. Ra. Ritawati dan Nurul Mubarak (2015) dengan judul *Efektifitas Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) terhadap UMKM di Kota Palembang*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sosial Bank Indonesia untuk UMKM terpilih sudah berjalan dan terlaksana dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah produk makanan yang dijual, meningkatnya omzet penjualan dan bertambahnya jumlah karyawan.
7. Djamilla Abbas (2018) dengan judul *Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UKM Kota Makassar*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh modal, orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja UKM di kota Makassar.

---

<sup>38</sup> Rahmanda Muhammad Thaariq, *Kemiskinan Multidimensi dan Risiko Covid-19 di Indonesia*, Prakarsa Working Paper No.1, 2020, hlm.1.

8. Komang Adi Wirawan (2015) dengan judul *Pengaruh Bantuan Dana Bergulir, Modal Kerja, Lokasi Pemasaran dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Sektor Industri di Kota Denpasar*. Dari hasil peneltiain menunjukkan bahwa dana bergulir dan modal kerja secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota Denpasar melalui volume produksi.
9. Siti Fatmawati (2015) dengan judul *Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai untuk Mengurangi Kemiskinan dalam Prespektif Islam*. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian bantuan diberikan secara tiba-tiba tanpa adanya pendataan terlebih dahulu yang melibatkan pemerintah desa. Hal ini yang menyebabkan adanya penerima bantuan yang berasal dari keluarga tidak miskin dan tidak sesuai dengan tujuan program yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Disribusi yang seperti ini tidak tepat menurut perspektif Ekonomi Islam. Barang konsumtif seperti Bantuan Pangan Non Tunai seharusnya untuk masyarakat miskin, dan bukan untuk masyarakat kaya. Karena dalam Ekonimi Islam yang dibutuhkan masyarakat kaya adalah modal untuk investasi dalam meningkatkan ekonomi mereka.”<sup>39</sup>
10. Naerul Edwin Kiky Aprianto (2017) dengan judul *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Prespektif Ekonomi Islam*. “Artikel ini menyimpulkan bahwa konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu: (1) jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu); (2) antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga); (3) individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat); dan (4) antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara). Oleh karena itu, konstruksi sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis. Apabila jaminan sosial mampu diselesaikan oleh individu,

---

<sup>39</sup> Jurusan Ekonomi Islam et al., “Siti Fatmawati NIM. 1505026057” (2019).

maka cukup di level individu. Apabila tidak bisa diselesaikan di level individu, maka akan diselesaikan di level keluarga. Apabila tidak selesai di level keluarga, maka akan diselesaikan di level masyarakat. Apabila jaminan sosial tidak selesai di masyarakat, maka kewajiban negara menyelesaikannya”.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 237–262.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PROGRAM BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) DI DESA TENDAS KECAMATAN TAYU**

### **3.1 Gambaran Umum Wilayah Desa Tendas**

#### 3.1.1. Struktur Organisasi Desa Tendas<sup>41</sup>

Kepala Desa	: Rozi
Sekretaris Desa	: Sri Pangestuti
Kaur Administrasi dan Umum	: Abdul Choris
Kadus Setro	: Mohammad Sugianto
Kasi Pemerintahan	: Ahmad Muhlisin
Kasi Pembangunan	: Sukardi
Kasi Kesra	: Habib Umar

#### 3.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ketua	: Sukamto
Wakil Ketua	: Yustam Moromardi
Sekretaris	: Yustam Usup
Bendahara	: Jaenuri
Seksi Agama	: Suhud
Seksi Pembangunan	: Ali Subki
Seksi Pendidikan	: Joko Purnomo
Seksi Kesehatan	: Sri Pangestuti
Seksi Kesejahteraan	: Sutopo
Seksi Olahraga	: Suharto

#### 3.1.3. Kondisi geografis Desa Tendas

Desa Tendas merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Desa Tendas memiliki luas wilayah 170,090 Ha. Jarak Desa Tendas dari pusat pemerintahan kecamatan yaitu sejauh 1 km, dari pusat pemerintahan kota sejauh

---

<sup>41</sup> Buku Monografi Desa Tendas keadaan pada semester II tahun 2020

27 km, sedangkan dari ibu kota provinsi sejauh 10 km. Adapun Batas wilayah Desa Tendas meliputi:<sup>42</sup>

Sebalah utara : Sambiroto/ Sambiroto  
Sebelah selatan : Sendang Rejo  
Sebelah barat : Kedungbang/ Sumborejo  
Sebelah timur : Jepat lor

#### 3.1.4. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tendas

Dikutip dari buku monografi Desa Tendas memiliki jumlah penduduk 2.931 jiwa dengan total 1.025 KK pada tahun 2020. Dengan rasio jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.454 jiwa dan perempuan sebanyak 1.477 jiwa. Data komposisi masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui tingkat produktifitas warga dalam masing-masing bidang. Perlu diketahui bahwa selain bekerja sebagai petani/buruh, mayoritas penduduk desa Tendas bekerja sebagai pedagang.

*Tabel 3. 1 Jumlah Pekerja Berdasarkan Bidang Pekerjaan*

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	26
2.	TNI/ Polri	10
3.	Swasta	70
4.	Pedagang	337
5.	Petani	675
6.	Buruh	356
7.	Peternak	98

*Sumber: Buku monografi Desa Tendas*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selain sebagai petani dan buruh, mayoritas penduduk Desa Tendas bekerja sebagai pedagang. Artinya sebaran dan potensi UMKM di Desa Tendas cukup bagus untuk dikembangkan dengan penduduk yang sudah menekuni bidang wirausaha. Maka dari itu di tengah keadaan ekonomi yang tidak pasti, berkaitan dengan program Banpres tidak sedikit warga di Desa Tendas yang mengajukan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

---

<sup>42</sup> Buku Monografi Desa Tendas keadaan pada semester II tahun 2020

### **3.2 Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Desa Tendas**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau Bantuan Presiden (Banpres) Produktif (BPUM) merupakan langkah nyata dari pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19. Bantuan tersebut di buka sejak bulan Oktober 2020 dengan realisasi per 6 Oktober 2020 telah tersalurkan sebesar Rp 21,86 triliun atau sekitar 9,1 juta pelaku usaha mikro. Kemudian tahap ke 2 BPUM tahun 2020 disalurkan pada bulan Desember dengan target sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro, sehingga pada tahun 2020 program ini dapat menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro. Nominal yang diterima oleh pelaku usaha yang menerima bantuan yaitu sebanyak 2,4 juta per orang. Sebagaimana telah diatur oleh pemerintah, Menindaklanjuti dari Surat Kementerian Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah berikut adalah beberapa syarat dan ketentuan bagi pelaku usaha yang hendak mengajukan bantuan tersebut:<sup>43</sup>

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
4. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan legalitas Usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)/ izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6. Pelaku Usaha Mikro tidak sedang menerima KUR

Apabila sudah memenuhi persyaratan di atas, maka terdapat beberapa cara untuk mendapatkan bantuan tersebut:

#### **A. Tahap Pengusulan Calon Penerima**

---

<sup>43</sup> Surat Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 31 Mei 2021

Pihak pengusul merupakan pihak yang mengusulkan calon penerima BPUM. Dalam pasal 6 ayat 2 Permenkop-UKM no.6 Tahun 2020, Pengsul BPUM meliputi “dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten atau kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga penyalur program kredit pemerintah yakni BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman dan terdaftar di OJK serta Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan UMKM.merupakan pihak yang mengajukan permohonan calon penerima BPUM kepada Kementerian Koperasi dan UKM.”

Dalam Bab 2 juklak BPUM no. 98, pihak pengusul BPUM memiliki tugas untuk “menjaring calon penerima BPUM yang memiliki kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan, menyampaikan usulan calon penerima kepada Kementerian Koperasi dan UKM, dan mengkoordinir penerima BPUM untuk menyelesaikan administrasi pembukaan rekening”.

Pada tahun 2021 pelaksanaan program BPUM mengalami beberapa perbedaan khususnya terkait nominal yang diterima oleh penerima. Semula yang diterima sejumlah Rp 2,4 juta, pada tahun 2021 hanya menerima sejumlah Rp 1,2 juta saja. Menindaklanjuti surat dari Kementerian Koperasi tanggal 18 Mei 2021 Nomor: 388/Dep.2/V/2021 perihal pengusulan Calon Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, khususnya pelaksanaan di Kabupaten Pati, yaitu:

1. Pendataan pengusulan Bantuan bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) Gelombang ke II (kedua) bulan Juni Tahun 2021 diprioritaskan bagi pelaku Usaha Mikro yang belum pernah mendaftar, Program Bantuan bagi pelaku usaha mikro tahun 2020 dan gelombang I

(kesatu) bulan April tahun 2021. Hal ini dikarenakan data sudah tersedia di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

2. Pendaftaran pengusulan bantuan bagi pelaku usaha mikro melalui link: [bit.ly/bpumdinkoppati2021\\_2](https://bit.ly/bpumdinkoppati2021_2) oleh pelaku usaha mikro sendiri. Selanjutnya mengirimkan berkas ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati, Jln. Sunan Muria No. 4, Pati dalam waktu 1 x 24 jam. Apabila tidak mengumpulkan dokumen/berkas, maka data tidak akan dikirim ke Kementerian Koperasi. Adapun berkas yang dikumpulkan yaitu:
  - a. Foto Copy KARTU Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
  - c. Fotocopy NIB/IUMK
  - d. Foto Produk/Tempat Usaha
3. Pendataan pengusulan bantuan bagi pelaku usaha mikro di mulai hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 12.00 WIB.

Dalam pelaksanaannya semenjak pendistribusian Banpres tahap 1 tahun 2020, Berikut adalah beberapa pihak yang digunakan oleh masyarakat tendas untuk mengajukan program Banpres dari pemerintah:

1. Pemerintah Desa Tendas

Pihak pemerintah Desa Tendas secara sigap memberikan informasi kepada masyarakat Desa Tendas mengenai informasi BPUM tersebut. Sebagaimana penuturan dari Mas Sri Wahyudi *“Nggeh saya dapet informasi dari pihak desa mba, informasinya ya tidak formal Cuma dari mulut ke mulut”* tuturnya.<sup>44</sup> Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Desa Tendas memang tidak bersifat formal, pihak perwakilan hanya memberikan informasi melalui beberapa

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Mas Sri Wahyudi (penerima BPUM), pada hari Rabu 9 Juni 2021.

ketua RT. Kemudian masing-masing ketua RT menginformasikan kepada warga setempat.

Alur yang dilalui jika masyarakat desa ingin mengajukan melalui pemerintah desa yaitu, diminta untuk mengisi formulir yang disediakan oleh pemerintah desa. Formulir ini berisi identitas singkat individu yang mengajukan dan informasi mengenai usaha yang dijalankan, baik dari jenis usaha, lama usaha, pendapatan usaha. Selain itu diwajibkan untuk melampirkan berkas photocopy KTP, KK dan nomor rekening BRI atau nomor rekening bank yang berkaitan. Bagi yang tidak memiliki nomor rekening, maka diarahkan oleh pemerintah desa untuk segera membuat buku rekening. Hal ini dikarenakan bantuan akan diberikan melalui transfer ke nomor rekening penerima secara langsung, jika mendapat konfirmasi SMS dari pemerintah.

## 2. Koperasi Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Mekaar

PNM mekaar merupakan lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Melalui PNM Mekaar semua warga Desa Tendas yang menjadi nasabah diajukan oleh PNM Mekaar. Syarat yang ditentukan dan berkas yang di bawa juga lebih mudah karena data sudah terinput oleh pihak PNM Mekaar. Nasabah PNM Mekaar yang ingin mengajukan bantuan hanya perlu membawa photocopy KK dan KTP saja, dan tidak perlu mengisi formulir.

Meskipun tidak bersifat wajib, PNM Mekaar menganjurkan kepada nasabah yang berhasil mendapat bantuan Banpres untuk mencari dan mengajak satu orang menjadi nasabah PNM Mekaar. *“Sebenarnya nggak wajib mba, tapi ya dianjurkan dari PNM Mekaar kalo emang dapet bantuan ya nanti setelahnya disyaratkan*

*untuk mencari satu orang yang mau gabung jadi nasabah PNM Mekaar”, ujar Mba Nurul selaku nasabah PNM Mekaar.*<sup>45</sup>

### 3. Pihak Ketiga (Bank BRI)

Bank BRI merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk membantu pendistribusian BPUM di setiap daerah. Alur yang dilalui apabila masyarakat ingin mengajukan bantuan melalui Bank BRI yaitu harus membawa Keterangan Surat Usaha (KSU) dari pemerintah desa, membawa photocopy KTP dan KK. Pengaju bantuan juga diwajibkan harus memiliki rekening BRI, apabila belum memiliki maka akan dibuatkan langsung ketika proses pendaftaran di kantor Bank BRI. Namun, jika mengajukan melalui Bank BRI terdapat pengecualian, yaitu bagi yang memiliki hutang atau sudah dan sedang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan.

Masyarakat yang mengajukan BPUM dan berhasil mendapatkannya, Bank BRI menganjurkan untuk mengecek laman <https://eform.bri.co.id/bpum> terlebih dahulu guna menghindari antrean saat pengambilan dana.

Ketika ingin mengecek apakah tidak atau mendapat bantuan maka bisa melalui laman tersebut, lalu memasukan nomor e-KTP (NIK) dan mengisi kode verifikasi serta melanjutkan proses *inquiry* untuk mengetahui hasilnya. Bagi masyarakat yang mendapat BPUM dapat mengambil haknya dengan hanya membawa identitas diri yakni e-KTP asli ke kantor BRI. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pencairan yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM), surat pernyataan dan kuasa, formulir pembukaan/perubahan data rekening. Dokumen tersebut dilengkapi dan disediakan oleh kantor BRI ketika penerima bantuan datang untuk mencairkan dana bantuan.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Mba Nurul (nasabah PNM Mekaar), pada hari Rabu 9 Juni 2021.

## B. Tahap Pembersihan dan Validasi Data Calon Penerima

Tahap ini merupakan tahapan yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan “Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM”. Berdasarkan ketentuan tersebut, tahap pembersihan merupakan tahapan yang harus dilalui ketika data calon penerima BPUM telah diterima oleh deputi penanggung jawab program.

Tahapan ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pasal 9 ayat 2 Permenkop-UKM no.6 tahun 2020 menyatakan, “Pembersihan data merupakan penghapusan data calon penerima BPUM yang memiliki identitas sama atau ganda dengan data calon penerima BPUM yang diusulkan oleh lembaga pengusul lainnya, NIK yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan, dokumen persyaratan tidak lengkap, calon penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman perbankan lainnya.” Berdasarkan ketentuan pasal diatas, tahap pembersihan data merupakan tahap penghapusan data calon penerima BPUM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 Permenkop-UKM no.6 tahun 2020 Setelah proses pembersihan data dilakukan, proses selanjutnya yakni proses validasi.

Proses ini diatur dalam pasal 9 ayat 3 Permenkop UKM no.6 tahun 2020 yang menyatakan “Terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan menggunakan data SIKP dan SLIK.”

## C. Tahap Penetapan Calon Penerima

Tahap ini Merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses penetapan penerima dana BPUM. Berdasarkan pasal 10 Peremenkop-UKM no.6 Tahun 2020 menyatakan “KPA

menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM.” Sehingga pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan BAB II Poin C Juklak BPUM no. 98 tahun 2020, “KPA merupakan pejabat yang mendapat kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM”

#### D. Tahap Pencairan Dana Bantuan

Tahap ini diatur dalam pasal 11 Permenkop-UKM no,6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “KPA mencairkan dana BPUM: langsung ke rekening Penerima BPUM, melalui bank penyalur BPUM”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pencairan dana BPUM merupakan tahapan yang harus dilakukan ketika KPA telah menetapkan penerima BPUM. Dalam hal pencairan dana BPUM, KPA dapat mencairkan dana melalui rekening penerima BPUM secara langsung atau melalui Bank Penyalur BPUM.

### 3.3 Profil UMKM Penerima Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Desa Tendas

#### 3.3.1. Warung Kopi Mas Sri Wahyudi



*Gambar 3 1 Kondisi usaha penjual kopi*

Sebelum mas Sri membuka usaha warung kopi, Ia awalnya bekerja di tempat isi ulang air di daerah Pati, karena jauh dan upah

yang diterima sedikit jadi tahun 2017 akhir memilih keluar dan pada tahun 2019 memutuskan untuk membuka warung kopi di depan rumah.

Konsumen dari warung kopi mas Sri bukan hanya dari anak-anak Desa Tendas tetapi beragam dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan Mas Sri adalah seorang anak motor tepatnya klub motor Satria FU. Seperti warung-warung kopi lainnya, mas Sri juga menjual beberapa makanan atau minuman lainnya.

Sebelumnya warung kopi yang didirikan masih sederhana, karena berbagai masukan akhirnya warkop diperluas dan diberikan fasilitas wi-fi, sehingga para konsumen betah berlama-lama di warung kopi. Warung kopi mas Sri buka s.d pukul 24.00. Berdasarkan dari hasil wawancara Mas Sri tdk pernah mengajukan bantuan selain BANPRES *“saya ngga pernah mengajukan bantuan modal usaha apapun ig mbak, soalnya ribet kadang juga banyak berkas yang nggak bisa saya penuhi”*

### 3.3.2. Mpek-Mpek Pak Sudadi



*Gambar 3 2 Kondisi Usah Mpek-Mpek Pak Sudadi*

Pak Sudadi mulai membuka usaha pada tahun 2012, sebelumnya beliau merantau ke Kalimantan sejak tahun 2007. Disana beliau bekerja sebagai anak buah yang setiap harinya keliling jualan mpek-mpek milik bosnya. Awal keliling memakai

gerobak dorong, kemudian beralih ke sepeda. Setahun kemudian anaknya, Agus menyusul turut serta bekerja di tempat yang sama.

Kemudian setelah beberapa tahun Pak Sudadi dan Mas Agus pulang dan berbekal ilmu dari perantauan mereka berjualan mpek-mpek keliling menggunakan sepeda motor. Biasanya pak sudadi berkeliling di sekitar desa tendas dan sumberejo. Setiap harinya pak sudadi dan istri bangun jam 4 untuk memulai mencetak adonan. Sedangkan Pak Sudadi keliling mulai jam 8 pagi.

Untuk pendapatan selama pandemi berkurang karena banyak sekolah yg diliburkan, sehingga yg dahulunya pulang jam 2 sekarang bisa sampai menjelang maghrib.

### 3.3.3. Penjahit Eko Karyono



*Gambar 3 3 Kondisi Usaha Jahitan Pak Eko*

Usaha jahit ini dimulai tahun 2010. Keahlian menjahit diperoleh dari les jahit yg dulu dilalui selama kurang lebih 4 bulan. Nama usahanya yakni "Winata Tailor", Winata sendiri adalah nama sang istri. Mba Win ini menerima jahitan baik baju pria/wanita maupun anak. Pelanggannya berasal dari desa tendas, keburomo, jepat, yakni yang kenal dengan beliau.

Di masa pandemi ini Mba win mengaku bahwa usahanya tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pandemi. Hal ini dikarenakan anak sekolah di sekitar masih diwajibkan memiliki

seragam. Mba Win juga mengajukan Banpres dan bantuan yang beliau terima digunakan untuk membeli almari.

#### 3.3.4. Penjual Pakaian Ibu Machmudah



*Gambar 3 4 Kondisi Usaha Pakaian Ibu Machmudah*

Mba machmudah mempunyai semacam toko dirumah, beliau menjual pakaian muslim. Nama tokonya "Ufa House Muslim", diambil dari nama anak Ufaira Nur Afifa.

Selain menjual pakaian beliau juga dapat menjahit sehingga jika pakaian yg dibeli dirasa kebesaran dapat ia kecilkan sesuai dengan pesanan atau custom dari pembeli. Kemampuan jahit yang dimiliki Mba machmudah didapat secara otodidak, ini dikarenakan dulu suaminya bekerja sebagai pembuat kasur sehingga mempunyai mesin jahit. Pada situasi pandemi saat ini tidak terlalu berdampak pada usaha, bahkan terhitung seperti biasanya. Tetapi setelah mendapat bantuan laba bertambah karena mba machmudah dapat membeli mesin obras sendiri. Dulu sebelum mendapat bantuan Mba Machmudah harus ke tempat obras yang membutuhkan waktu dan membayar jasa. Namun setelah mendapat bantuan dan dapat membeli mesin sendiri, maka ia dapat melakukannya sendiri dan menekan budget produksi.

#### 3.3.5. Meubel Ibu Siti Amiatun



*Gambar 3 5 Kondisi Meubel Ibu Siti Amiatun*

Usaha Mebel ini dijalankan oleh suami yakni Bapak Yatno. Memulai usaha mebel mulai tahun 2019 dengan nama "Dua Putra Jaya". Produksi mebel yg dihasilkan mulai dari meja, kursi, almari, buffet, tempat tidur. Keahlian yang didapat oleh Bapak Yatno yaitu dari pengalaman kerja di Jepara sejak usia 14 tahun. Saat itu gaji yang beliau dapat tidak banyak tetapi karena tekad untuk belajar dan mendapat keahlian sehingga masih ditekuni.

Saat dirasa mampu mendirikan usaha sendiri Pak Yatno keluar dan memilih membuka usaha dirumah dengan memperkerjakan temanya dari Jepara. Sedangkan untuk bidang pemasaran beliau sudah memasarkan produknya sampai Kudus, Purwodadi, Jakarta, dan kota lain di pulau jawa.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Efektifitas Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Kinerja Usaha UMKM Terdampak Covid-19 di Desa Tendas Kecamatan Tayu

#### 4.1.1 Karakteristik Responden

Pada karakteristik responden yang akan dibahas adalah mengenai jenis kelamin, usia, jenis usaha,

##### a. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4. 1

Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1.	Laki-laki	16	80%
2.	Perempuan	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 responden atau 80%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 responden atau 20%.

##### b. Usia Responden

Tabel 4. 2

Usia Responden

No	Usia	Jumlah Responden	Presentase
1.	30	3	15%
2.	36	5	25%
3.	37	2	10%
4.	40	3	15%
5.	42	1	5%

6	47	4	20%
7.	56	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak ada pada usia 36 tahun, sedangkan jumlah responden paling sedikit berada pada usia 42.

c. Jenis Usaha responden

Tabel 4. 3

Jenis Usaha Responden

No	Jenis Usaha	Jumlah Responden	Presentase
1.	Warung kelontong	1	5%
2.	Pedagang Kelinci	1	5%
3.	Pedagang Pentol	1	5%
4.	Penjual Pakaian	1	5%
5.	Bengkel	1	5%
6.	Penjual Es Gempol	1	5%
7.	Pedagang Bensin	1	5%
8.	Penjual Ayam	1	5%
9.	Warung Kelontong	4	5%
10.	Penjual Sembako	1	5%
11.	Penjahit	1	5%
12.	Peternak Ayam	1	5%
13.	Warung Kopi	1	5%
14.	Toko Plastik	1	5%
15.	Penjual Mpek- Mpek	1	5%
16.	Mebel	1	5%
17.	Bengkel	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan data diatas, responden yang menjadi objek penelitian yaitu semua wirausahawan atau UMK yang memiliki omzet belum seberapa. Dari data di atas jenis usaha yang paling banyak di perankan adalah sebagai warung kelontong, yaitu sejumlah 4 dari 20 responden.

#### 4.1.2 Hasil Jawaban Responden

Kuesioner yang dibuat oleh penulis untuk mengetahui efektifitas Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang menjadi program untuk memulihkan ekonomi nasional terutama UMKM disebar kepada 20 sampel penerima BPUM. Pernyataan kuisisioner ini bersifat positif yang dibuat berdasarkan atas indikator efektifitas dan indikator kinerja usaha yang terdiri dari pendapatan usaha, aset usaha, keuntungan usaha, dan stabilitas usaha.

##### a. Indikator Efektifitas

Tabel 4. 4

Hasil kuisisioner mengenai sosialisasi tentang banpres

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
1.	Mendapat informasi/sosialisasi tentang banpres dari pihak terkait	15	5	75% + 25 = 100%

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 dari total 20 responden dapat diketahui bahwa 75% responden menyatakan sudah mendapat sosialisasi mengenai BPUM.

Tabel 4. 5

Hasil kuisisioner mengenai hak dan tujuan sebagai penerima banpres

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
2.	Mengetahui tujuan hak,	6	14	30%+70%

	kewajiban dan tujuan sebagai penerima			=100%
--	---------------------------------------	--	--	-------

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan table 4.5 tabel dari total 20 responden dapat diketahui bahwa 70% responden sudah mengetahui hak dan tujuan sebagai penerima BPUM.

Tabel 4. 6

Hasil kuisisioner mengenai ketepatan waktu pencairan dana

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
3.	Pencairan dana dilakukan tepat waktu	20	0	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan table 4.6 tabel dari total 20 responden dapat diketahui 100% responden menyatakan bahwa pencairan dana dilakukan tepat waktu.

Tabel 4. 7

Hasil kuisisioner mengenai ketepatan jumlah uang

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
4.	Jumlah uang yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan	20%	0	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan table 4.7 tabel dari total 20 responden dapat diketahui bahwa 100% responden menyatakan dana yang diterima sesuai dengan aturan.

Tabel 4. 8

Hasil kuisisioner mengenai kesesuaian dana yang digunakan

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
5.	Dana yang diterima digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha	20%	0	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.8 tabel dari total 20 responden dapat diketahui bahwa 100% responden menyatakan dana yang diterima digunakan untuk kebutuhan usahanya.

*Tabel 4. 9*

*Hasil kuisisioner mengenai pemantauan petugas tentang alokasi dana*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
6.	Mendapat pemantauan dari petugas mengenai alokasi dana bantuan	0	20	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% responden menyatakan tidak ada pemantauan dari petugas mengenai penggunaan dana yang diterima.

b. Indikator Pendapatan Usaha

*Tabel 4. 10*

*Hasil kuisisioner mengenai meningkatnya pendapatan setelah menerima banpres*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
1.	Setelah mendapatkan banpres pendapatan usaha saya meningkat	17	3	85%+15 =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 85% responden menyatakan usahanya meningkat setelah mendapat BPUM.

*Tabel 4. 11*

*Hasil kuisisioner mengenai bertambah setelah banpres*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
2.	Modal kerja saya bertambah	20	0	100

	setelah mendapat banpres			
--	--------------------------	--	--	--

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden 100% menyatakan modal kerja bertambah setelah menerima BPUM.

*Tabel 4. 12*

*Hasil kuisisioner mengenai bertambahnya pendapatan setelah menerima pembiayaan*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
3.	Setelah mendapatkan pembiayaan harga barang yang saya jual menjadi lebih murah sehingga pendapatan saya bertambah.	2	18	10%+90% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 90% responden menyatakan tidak menurunkan harganya setelah mendapat BPUM. Tetap dengan harga jual sebelumnya.

*Tabel 4. 13*

*Hasil kuisisioner mengenai membuka lapangan UMKM*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
4.	Setelah mendapatkan banpres saya membuka lapangan UMKM	0	20	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% responden menyatakan tidak membuka lapangan kerja baru dalam usahanya.

c. Aset Usaha

*Tabel 4. 14*

*Hasil Kuisisioner mengenai peningkatan penjualan setelah banpres*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
----	-----------------	----	-------	------------

1.	Nilai penjualan saya meningkat setelah mendapat banpres	5	15	25%+75% =100%
----	---	---	----	------------------

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 75% responden menyatakan pejualannya tidak meningkat setelah mendapat BPUM

*Tabel 4. 15*

*Hasil kuisisioner mengenai kenaikan jumlah konsumen*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
2.	Adanya kenaikan jumlah konsumen pembeli setelah mendapatkan banpres	10	10	50%+50% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 50% responden menyatakan bahwa terdapat kenaikan jumlah konsumen yang membeli setelah mendaat BPUM.

*Tabel 4. 16*

*Hasil kuisisioner mengenai meningkatnya stock barang atau produk*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
3.	Stock barang/produk yang tersedia setelah mendapatkan banpres bertambah meningkat	16	4	80%+20% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 80% responden menyatakan stock barang meningkat setelah mendapat BPUM.

*Tabel 4. 17*

*Hasil kuisisioner mengenai meningkatnya kualitas barang*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
4.	Setelah mendapatkan banpres saya dapat menyediakan barang	6	14	30%+70% =100%

	dengan kualitas yang lebih baik			
--	---------------------------------	--	--	--

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 70% responden menyatakan kualitas barang yang dijual tidak mengalami peningkatan.

*Tabel 4. 18*

*Hasil kuisisioner mengenai penambahan tenaga kerja*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
5.	Saya dapat menambah tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasional usaha saya	1	19	5%+95% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 95% responden menyatakan tidak menambah tenaga kerja untuk membantu mengelola usahanya.

*Tabel 4. 19*

*Hasil kuisisioner mengenai peralatan usaha semakin mendukung*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
6.	Peralatan pendukung usaha semakin lengkap setelah mendapat banpres	15	5	75%+25% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 75% responden menyatakan peralatan dalam usahanya menambah setelah menerima BPUM.

#### d. Keuntungan Usaha

Tabel 4. 20

*Hasil Kuisisioner mengenai meningkatnya keuntungan*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
1.	Keuntungan saya meningkat setelah mendapatkan banpres	17	3	85%+15% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 85% responden menyatakan keuntungan usahanya meningkat setelah menerima BPUM.

Tabel 4. 21

*Hasil kuisisioner mengenai membuka galeri baru*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
2.	Setelah mendapatkan banpres saya dapat membuka galeri baru	0	20	100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% responden menyatakan tidak membuka kedai atau galeri usaha baru setelah menerima BPUM.

Tabel 4. 22

*Hasil kuisisioner mengenai meningkatnya laba*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
3.	Setelah mendapat banpres laba yang saya peroleh > Rp. 1.500.000	12	8	60%+40% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 60% responden menyatakan bahwa labanya meningkat setelah menerima BPUM.

e. Stabilitas Usaha

Tabel 4. 23

*Hasil kuisisioner mengenai perkembangan usaha yang meningkat*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
1.	Setelah mendapatkan banpres saya mengalami perkembangan yang cukup baik	17	3	85%+15% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 85% responden menyatakan bahwa udaranya mengalami perkembangan yang cukup baik setelah menerima BPUM.

Tabel 4. 24

*Hasil kuisisioner mengenai mampu merenovasi galeri usaha*

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
2.	Setelah mendapatkan banpres saya bisa memperbaiki atau merenovasi galeri usaha	10	10	50%+50% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 50% responden menyatakan dapat memperbaiki atau merenovasi galeri usaha miliknya setelah menerima BPUM.

Table 4.25 Terpenuhinya Kebutuhan Pokok

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Presentase
3.	Setelah usaha saya mendapat Banpres, kebutuhan pokok keluarga saya menjadi terpenuhi	19	1	95%+5% =100%

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 95% responden menyatakan kebutuhan keluarganya terpenuhi setelah mendapat BPUM.

## 4.2. Analisis Data

Efektifitas suatu program dikatakan tercapai apabila tujuan dari program tersebut terpenuhi. Begitu pula Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) harus terlaksana secara efektif, karena salah satu tujuan dari program ini sangatlah krusial yaitu untuk membantu pemulihan ekonomi nasional ditengah krisis akibat pandemi covid-19. Namun perlu disadari bahwa program ini untuk pertama kalinya bagi Indonesia memberikan bantuan begitu besar kepada UMKM dengan prosedur yang bisa dikatakan terburu-buru. Maka dari itu perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak untuk bersama-sama mengevaluasi dan menilai apakah program tersebut sudah terlaksana dengan baik dan efektif. Sehingga pelaksanaan ke depan semakin maksimal dan dapat mencapai tujuannya. Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai temuan lapangan mengenai efektifitas BPUM terhadap kinerja UMKM di Desa Tendas:

### 1. Indikator Efektifitas

Efektifitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu program dikatakan berhasil atau tidak. Melalui efektifitas pula dapat diketahui keberhasilan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siangin, 2001:24). Berdasarkan temuan lapangan mengenai indikator efektifitas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program BPUM di Desa Tendas Kecamatan Tayu telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat desa. Namun, karena informasi yang disampaikan sifatnya terbatas dalam artian banyak masyarakat yang kurang bisa memahami dengan baik, maka banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik apa hak dan kewajiban sebagai penerima BPUM. Hal ini dibuktikan dengan jawaban kuisisioner bahwa sebanyak 14 responden atau 70% responden menjawab tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai penerima BPUM. Masalah

ini jelas akan berimplikasi pada proses selanjutnya, yaitu banyak penerima BPUM yang tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan usaha, justru untuk keperluan lain yang sifatnya pribadi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sudadi (penjual mpek-mpek) penerima BPUM “*sebagian saya gunakan untuk keperluan usaha mbak, tapi ya ada yang saya gunakan untuk keperluan rumah tangga, lha wong nggak diawasi jadi ya nggak apa-apa. Kita juga nggak disuruh untuk membuat laporan penggunaan dana*” tutur beliau.<sup>46</sup> Memang sudah seharusnya pemerintah dalam melaksanakan program tersebut dilengkapi dengan prinsip mitigasi risiko yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan dari pihak berwajib untuk memastikan bahwa dana yang digunakan terpakai secara tepat sasaran. Namun secara sistem memang belum matang, belum dijelaskan dan disebut secara rinci mengenai pengawasan tersebut. Sesuai dengan hasil kuisisioner yang disebar, sejumlah 20 responden atau 100% menjawab tidak mendapat pengawasan dari pihak terkait. Poin ini harus menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholder* dalam mengoptimalkan program BPUM. Meski demikian, pencairan dan dana yang diterima telah tepat waktu dan tepat jumlah.

## 2. Indikator Kinerja Usaha

Kinerja usaha merupakan modifikasi dari keinginan untuk memenuhi tujuan bisnis, yaitu tingkat pentingnya tujuan-tujuan bisnis dengan penilaian atas tujuan-tujuan bisnis, yaitu kepuasan dengan pencapaian tujuan (Mujib, 2010). Dalam penelitian ini untuk mengukur efektifitas kinerja usaha maka didasarkan pendapatan usaha, aset usaha, keuntungan usaha dan stabilitas usaha. Berikut penulis uraikan hasil temuan lapangan dari setiap poin tersebut:

### a. Pendapatan Usaha

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Sudadi, pada tanggal 10 Juni 2021.

Menurut Chaniago (1995:14) yang dimaksud dengan omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu produk barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan usaha yang mengalami peningkatan tertentu mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan dalam usaha, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data yang penulis peroleh, pendapatan setiap respondeng dalam penelitian ini hampir semuanya mengalami penurunan. Hal ini jelas dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi Covid-19. Berikut adalah tabel mengenai pendapatan usaha responden dari sebelum pandemi dan setelah pandemi Covid-19.

#### 4.26 1 Daftar pendapatan responden

No	Penerima	Jenis Usaha	Sebelum pandemi	Setelah pandemi
1	Nurul Faizah	kelontong	Rp 3000.000	Rp 2.500.000
2	Qomariyah	jual kelinci	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000
3	Siti Kayati	Pentol	Rp 10.500.000	Rp 9.000.000
4	Mahmudah	Pakaian	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
5	Partiah	Bengkel	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000
6	Wartini	es gempol	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
7	Uka	Bensin	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000
8	Siti	Penjual ayam	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
9	Jaminah	Kelontong	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
10	Winarsih	Penjahit	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
11	Zuliyah	kelontong	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000
12	Siti	Ayam	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
13	Rawini	Warung kopi	Rp 3.500.000	Rp 2.700.000
14	Siti Wahyudi	Warung kopi	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000
15	Sudarti	Toko plastik	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000

16	Sutartik	Kelontong	Rp 5.000.000	Rp 3.800.000
17	Sudadi	Penjual mpek-mpek	Rp 10.500.000	Rp 7.500.000
18	Eko	Penjahit	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
19	Siti Amiatun	Mebel	Rp 9.000.000	Rp 8.000.000
20	Supriyono	Bengkel	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan dari hasil sebaran kuisisioner dapat dibuktikan bahwa setelah mendapat bantuan BPUM, pendapatan usaha penerima bantuan meningkat. Sejumlah 17 responden atau 85% menjawab pendapatan meningkat sedangkan 15% menjawab tidak meningkat. Meskipun pendapatan usaha menaik tidak seberapa hanya kisaran Rp 100.000 sampai Rp 700.000 tetapi sudah cukup membantu UMKM untuk survive dalam bisnisnya. *“memang bantuan modal nya ngga seberapa ya mba, hanya 2,4 juta apalagi tahun 2021 kan jadi 1,2. Ya sakjane ngga terlalu berpengaruh, tapi lumayan lah mba bisa nutup rugi, kalopun naik pendapatannya ya ngga seberapa. Tapi ya kita bersyukur pemerintah mengadakan program seperti ini”* Tutur Pak Eko penjahit sekaligus penerima BPUM.<sup>47</sup>

b. Aset Usaha

Peningkatan aset usaha merupakan indikator meningkatnya kinerja suatu usaha. Menurut Tunggal (2002: 18-19) dalam sebuah usaha, aset merupakan fungsi penting yang akan menunjang kinerja usaha baik untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari kuisisioner yang disebar, sejumlah 80% responden menjawab bahwa mereka dapat menambah stock

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Pak Eko Penjahit (penerima BPUM), pada hari Jumat 19 Juni 2021.

barang/produk/ atau membeli peralatan tambahan setelah menerima BPUM, meskipun dengan ukuran kualitas yang sama dalam artian tidak menambah peningkatan kualitas barang. Mereka menggunakan danan tersebut untuk membeli stock barang seperti halnya Pak Wahyudi pemilik warung kopi “*Lumayan mbak uangnya buat tambahan saya beli barang-barang, sempet bingung kemaren pendapatan lagi sedikit ga ada modal lagi buat beli-beli, jadi ya bersyukur bisa dapet bantuan jadi saya bisa belanja lagi*” ujar beliau.<sup>48</sup>

No	Penerima	Jenis Uaha	Sebelum pandemi	Setelah pandemi
1	Nurul Faizah	kelontong	Rp 1000.000	Rp 700.000
2	Qomariyah	jual kelinci	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
3	Siti Kayati	pentol	Rp 3000.000	Rp 2.500.000
4	Mahmudah	pakaian	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
5	Partiah	Bengkel	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000
6	Wartini	es gempol	Rp 900.000	Rp 500.000
7	Uka	bensin	Rp 800.000	Rp 700.000
8	Siti	Penjual ayam	Rp 1.700.000	Rp 1.300.000
9	Jaminah	Kelontong	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
10	Winarsih	Penjahit	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
11	Zuliyah	kelontong	Rp 2.100.000	Rp 1.500.000
12	Siti	ayam	Rp 900.000	Rp 700.000
13	Rawini	Warung kopi	Rp 2000.000	Rp 1.500.000
14	Siti Wahyudi	Warung kopi	Rp 800.000	Rp 500.000
15	Sudarti	Toko plastik	Rp 800.000	Rp 500.000
16	Sutartik	Kelontong	Rp 2.500.000	Rp 1.700.000

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Pk Wahyudi (penerima BPUM), pada hari Jumat 19 Juni 2021.

c	17	Sudadi	Penjual mpek-mpek	Rp 5000.000	Rp 3.500.000
	18	Eko	Penjahit	Rp 700.000	Rp 700.000
	19	Siti Amiatun	Mebel	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000
	20	Supriyono	Bengkel	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000

#### ngan Usaha

Berdasarkan dari indikator sebelumnya yaitu pendapatan usaha, responden mengaku bahwa pendapatan usahanya meningkat. Sedangkan menurut Triyuwono dan As'udi (2001:9) “pendapatan usaha terkait dengan laba atau rugi yaitu jika terjadinya kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu, maka akan menghasilkan laba”. Namun jika sebaliknya apabila terjadi kekurangan pendapatan atau defisit dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu, maka usaha tersebut mengalami rugi. Dari data yang penulis dapatkan, hampir seluruh responden mengalami penurunan keuntungan usaha setelah pandemi Covid-19. Adapun mereka yang keuntungannya mengalami stabilitas itu dibantu dengan jenis usahanya yang sifatnya momentum seperti penjahit yang terus mengalami pesanan karena momen lebaran dan momen tahun ajaran baru untuk pembuatan sragam. Berikut adalah tabel mengenai keuntungan usaha responden sebelum dan setelah pandemi.

Dari hasil kuisisioner yang disebar, sejumlah 85% responden atau sebanyak 17 responden menjawab “Ya” bahwa keuntungan usahanya mengalami peningkatan setelah mendapat bantuan program BPUM. Hal ini sangat berkaitan erat dengan indikator aset usaha sebelumnya responden yang

mengalami rugi tidak bisa membeli stock barang, maka mereka bisa kembali berbelanja sehingga dapat mendorong meningkatnya keuntungan usaha setelah menerima bantuan.

d. Stabilitas Usaha

Stabilitas usaha merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang kemudian diukur dengan cara mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atas hutang-hutangnya secara tepat waktu serta kemampuan menjalankan usahanya secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan (Munawir:2003). Berdasarkan hasil dari temuan lapangan, hasil kuisioner sejumlah 85% responden menjawab bahwa usahanya mengalami perkembangan yang cukup baik dalam artian usahanya kembali stabil setelah mendapat dana bantuan BPUM. Bahkan 50% mengaku mereka terbantu sehingga dapat memperbaiki atau merenovasi kecil-kecilan galeri usahanya dari dana bantuan tersebut. Dengan usaha yang kembali stabil sejumlah 95% responden mengaku setelah mendapat dan bantuan, kebutuhan pokok keluarganya dapat kembali tercukupi dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Supriyono pemilik usaha jasa bengkel *“awal-awal bingung mbak, usaha nya macet keuntungan turun dan saya juga butuh untuk belanja kebutuhan bengkel. Kadang makan jadi harus diirit-irit. Tapi ya alhamdulillah setelah dapat bantuan bisa belanja lagi, dapet untung lagi ya semoga bisa stabil terus”*<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian analisis di atas dapat dikatakan bahwa program BPUM efektif dalam meningkatkan kinerja usaha UMKM. Terbukti dari hasil sebaran kuisioner bahwa dari indikator kinerja usaha yang terdiri dari

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Pak Supriyono (penerima BPUM), pada Hari Jumat 18 Juni 2021.

pendapatan usaha, keuntungan usaha, aset dan stabilitas usaha mengalami peningkatan dan sebagian besar sangat merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang harus menjadi bahan evaluasi dan dibenahi salah seperti harus adanya pengawasan dari pihak berwajib terhadap penerima BPUM, supaya dana yang digunakan benar-benar untuk keperluan usahanya. Kemudian untuk proses seleksi seharusnya ada survey lapangan untuk memastikan bahwa penerima BPUM terbukti memang memiliki usaha.

#### **4.3. Analisis Efektifitas Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Kinerja Usaha UMKM Terdampak Covid-19 di Desa Tendas Kecamatan Tayu dalam Prespektif Ekonomi Islam**

Paradigma Islam memandang bahwa pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap para fakir miskin yang berada di bawah daerah kekuasaannya dan menjamin keselamatan hidup mereka. Pemerintah juga harus mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya dari berbagai sumber daya alam maupun non alam untuk kemaslahatan umat, bukan hanya sebagai sumber pemenuhan kekayaan penguasa. Dalam pandangan Islam keadaan miskin seseorang adalah sebuah bencana dan musibah, dan Islam menganjurkan kepada setiap umat untuk berlaku sederhana dan mengatur pola konsumsi dan terus bekerja atau usaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sejalan dengan nilai-nilai Islam, pemerintah Indonesia menunjukkan bentuk tanggungjawabnya terhadap perekonomian umat khususnya dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional saat pandemi khususnya untuk UMKM melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kemudian dalam pelaksanaannya sudah menjadi tuntutan bahwa pemerintah harus menjalankannya dengan adil, sebagaimana nilai-nilai Islam berikut ini:

1. Keadilan

Keadilan menjadi nilai utama dalam segala aspek kehidupan bagi Islam, dan Allah selalu memerintahkan kepada hambanya untuk berlaku adil, baik kepada dirinya sendiri, maupun orang lain. Pada penelitian BPUM di Desa Tendas dibuktikan bahwa belum menjunjung nilai keadilan, karena pelaksanaan dan pendistribusian bantuan ternyata belum tepat sasaran. Terdapat penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak memiliki usaha namun mengajukan bantuan dan mendapatkannya. Hal ini jelas bertolak belakang dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwa Q.S An-Nahl ayat 90: “Allah menyebutkan untuk memerintahkan hamba-hambanya berlaku adil dalam makna seimbang dan pertengahan serta untuk selalu berbuat kebajikan. Sedangkan menurut Sufyan Ibnu Uyaynah makna adil dalam surat ini adalah pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap hambanya dalam beribadah atau mengamalkan suatu amalan karena Allah SWT.” Dari tafsir tersebut maka seharusnya dalam pelaksanaan distribusi harus menjunjung nilai keadilan, jangan sampai bantuan tersebut salah sasaran karena akan merugikan pihak yang lebih membutuhkan. Pemerintah juga dalam menyikapi hal tersebut harus bijak dan sigap mengatasi sehingga permasalahan tersebut tidak terlalu berangsur-angsur sehingga tujuan utama program BPUM untuk membantu para UMKM dan

sebagai salah satu program pemulihan ekonomi nasional menjadi tidak tercapai.

## 2. Takaful (Jaminan Sosial)

Dalam Islam jaminan sosial adalah huquq Allah, atau sebuah tuntutan serta kewajiban bagi setiap hambanya yang memiliki harta berlebih untuk dibagikan atau dinafkahkan kepada orang yang tidak mampu. Hal ini dijelaskan dalam fiman-Nya dalam Q.S An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيُخِشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*

Sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir Q.S An-Nisa ayat 9 menjelaskan bahwa sesungguhnya: Ali Ibnu Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang lelaki yang sedang mendekati ajalnya, kemudian terdengar oleh seorang lelaki bahwa dia mengatakan sebuah wasiat yang mana memberikan mudharat bagi ahli warisnya. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada laki-laki yang mendengar wasiat tersebut, Hendaknya ia bertaqea kepada Allah, menuntut yang sakit dan meluruskan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan Allah. Hendaknya laki-laki sakit itu memandang kepada ahli warisnya, sebagaimana diwajibkan baginya untuk berbuat sesuatu karena dikhawatirkan ahli warisnya akan terlunta-lunta.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini

dalam dua bentuk. “Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri atau ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua. Dalam hal ini, bentuk kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.” Berdasarkan penjelasan tersebut maka program BPUM masuk ke dalam jaminan social sebagaimana yang telah Islam perintahkan kepada negara sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap rakyat. Sudah selayaknya dalam keadaan ekonomi yang sulit, pemerintah hadir sebagai penjamin kesejahteraan bagi warganya terlebih bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

### 3. Bertanggung jawab

Dalam kegiatan berekonomi untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan mengemban amanah harus diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar. Termasuk skala pemerintah yang memiliki kekuasaan serta otoritas dalam mengemban tanggung jawab hidup rakyatnya. Maka dari itu seorang pemimpin harus bisa memposisikan dirinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan bagi rakyatnya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Muddatsir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,”*

Berdasarkan pada tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat Al-Muddatsir ayat 38 menjelaskan bahwa: Allah berfirman bahwa “tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya”. Artinya setiap individu bergantung pada amal perbuatannya di akhirat kelak, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya.

Dapat ditarik pemahaman dari tafsir Ibnu Katsir bahwa setiap diri memiliki tanggungjawab begitupula bagi seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyat dan negaranya. Sebagai bentuk usaha untuk mencapai kesejahteraan maka seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab dan mampu mengemban amanah dari rakyatnya, karena kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dalam pelaksanaannya pada program BPUM sikap tanggung jawab dari seorang pemimpin belum sepenuhnya terbentuk. Karena belum adanya bentuk pengawasan yang terakomdir mengenai pemanfaatan dana BPUM oleh penerima. Masih terdapat beberapa penerima BPUM yang menggunakan dana tersebut diluar keperluan usaha, dan sampai saat ini belum ada pengawasan dari pihak pemerintah untuk membentuk rasa tanggungjawab penerima BPUM.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data lapangan penulis mengenai efektifitas BPUM terhadap kinerja usaha UMKM, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalam pelaksanaannya mengenai distribusi dana bantuan BPUM masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi atau menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholder*, yang paling utama adalah mengenai pengawasan penggunaan dana bantuan. Tidak adanya pengawasan dana bantuan berimplikasi pada penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Sementara mengenai efektifitas dana BPUM terhadap kinerja UMKM berdasarkan indicator kinerja usaha seperti, pendapatan usaha, keuntungan usaha, asset usaha dan stabilitas usaha, maka dapat disimpulkan bahwa dana BPUM dapat meningkatkan kinerja usaha UMKM selama pandemic ini. Sebanyak 85% responden mengaku pendapatannya meningkat setelah menerima dana bantuan, Kemudian untuk asset usaha sebanyak 80% responden mampu membeli barang atau stock Kembali. Selain itu sejumlah 85% responden mengalami kenaikan keuntungan usaha serta stabilitas usahanya meningkat.
- b. Pelaksanaan program dana bantuan BPUM apabila dilihat dari prespektif Islam, dengan diadakannya program tersebut menunjukkan sika tanggungjawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan prinsip tolong menolong yang diwujudkan dalam bantuan sosial. Sebagai mana dalam Islam bahwa jaminan sosial merupakan huquq Allah, atau sebuah tuntutan serta kewajiban bagi setiap hambanya yang memiliki harta berlebih untuk dibagikan atau dinafkahkan kepada orang yang tidak mampu. Dalam hal ini adalah UMKM yang memang sedang membutuhkan bantuan. Namun dari sisi nilai keadilan dan bertanggungjawab, hal ini belum sesuai dengan prinsip Islam. Karena dalam pelaksanaannya dari

hasil wawancara masih ada beberapa yang kurang tepat sasaran. Serta dengan tidak adanya pengawasan yang tersistem maka tanggungjawab dari sisi penerima dan pemerintah kurang maksimal.

## **5.2.Saran**

- a. Pelaksanaan BPUM selama pandemic harus dievaluasi dan dimentoring lebih jauh oleh pemerintah. Dengan dana yang minim seharusnya bisa lebih dimaksimalkan pengawasannya, supaya penerima BPUM lebih hati-hati dalam memanfaatkan dana tersebut sehingga kinerja usaha UMKM selama pandemic semakin meningkat lagi. Pengawasan harus segera dilaksanakan serta dibuat system yang matang sehingga dampaknya akan lebih progresif terhadap perekonomian Indonesia serta mendorong berhasilnya program pemulihan ekonomi nasional di masa pandemic.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, harapannya dapat menulis penelitian terkait selama pandemic mengenai dana bantuan khususnya terhadap kinerja UMKM. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan kebijakan dari hasil penelitian yang ilmiah. Serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. (2018). Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UKM Kota Makassar. *Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi*, 215.
- Amalia, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Pelatihan, Bantuan Modal, dan Cara Pengelolaan Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM Sentra Batik Desa Bengle Kab. Tegal). *Permana*, 107.
- Amri, A. (2020, Juni 1). Dampak Covid 19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2, 124.
- Azwar, S. (1997). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka .
- Badrudin. (2012). *Dasar-dasar Manajemen* . Bandung: Alfabeta.
- Budiani, N. W. (2018). Efektifitas Program Penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 52.
- Budiarto, R. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bungin, B. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- CNN Indonesia. (2021, 01 22). *UMKM Jadi Sektor Pertama Terdampak Corona*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210122140016-92-597179/umkm-jadi-sektor-pertama-terdampak-corona>
- Dahmiri. (2014). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun. *Mankeu*, 378.
- Ghony, D. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Att Ruz Media.
- Herdiansyar, H. (2013). *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. Jakarta: Raja Walipress.
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. (2021, April 1). *Penyaluran Banpres Produktif*. Retrieved from <https://kemenkopukm.go.id/read/penyaluran-banpres-produktif-usaha-mikro-di-bolaang-mongondow-timur-melibatkan-pemda>
- Jannah, S. M. (2020, Juni 28). *Kadin Sebut Ada 30 Juta UMKM Tutup Akibat Pandemi*. Retrieved from <https://tirto.id/kadin-sebut-ada-30-juta-umkm-tutup-akibat-pandemi-covid-19-fUa4>
- Kaelan. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kore, E. L. (2018, April 1). Analisis Kinerja Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM Sektor Industri Kecil Formal di Kabupaten Merauke). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11, 26-27.
- Maleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Menyelamatkan UMKM Menyelamatkan Ekonomi Indonesia*. (2020, 06 26). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200626123545-297-517786/menyelamatkan-umkm-menyelamatkan-ekonomi-indonesia>
- Mubarok, R. R. (2015). Efektifitas Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Terhadap UMKM di Kota Palembang. *Economics Journal* , 134.
- Nalini, S. N. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 665.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sahabuddin, R. (2015). *Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam Perspektif Kewirausahaan*. Makassar: Penerbit Carabaca.
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM masa Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 165.
- Strees, R. M. (1980). *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Erlangga.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tika, P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan, K. A. (2015). Pengaruh Bantuan Dana Bergulir, Modal Kerja, Lokasi Pemasaran dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Sektor Industri di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* , 522.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Andria Luckyyanti Wibisono  
TTL : Magelang, 18 Maret 1998  
Jenis Kelamin : P  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Tendas 2/2, Kec. Tayu Kab. Pati  
E-Mail : andriawibisono@gmail.com  
No. Hp : 082298732981

### **Riwayat Pendidikan :**

- ✓ SD Negeri Tayuwetan 03 (2004-2010)
- ✓ SMP Negeri 01 Tayu (2010-2013)
- ✓ MAN 02 Pati (2013-2016)
- ✓ UIN Walisongo Semarang (2017-2021)